LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa,karena atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun guna memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II huruf D dijelaskan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Wali Kota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 ini merupakan laporan setiap tahunnya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jambi sebagai salah satu komponen dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Jambi Tahun 2024. Penyusunan laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi,

Dra. Hj. NOVERINTIWI DEWANTI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19711125 199201 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 5
BAB I PENDAHULUAN 7
1.1 Struktur Organisasi 8
1.2 Tugas dan Fungsi 10
1.3 Isu-Isu Strategis 10
1.4 Kepegawaian 11
1.5 Keadaan Sarana Prasarana 13
1.6 Keuangan 15
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 15
BAB II 17
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 17
2.1 Perencanaan Strategis 17
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 17
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah 19
2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 21
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 25
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024 27
2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran 28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 313
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah 333
3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 34
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan 41
Tahun Lalu 41
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam 43
Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah 43
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi 45
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan 46
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 46
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 48
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan 49

Pencapaian Perjanjian Kinerja 49
3.2 Realisasi Anggaran 2024 52
BAB IV PENUTUP 58
4.1 Kesimpulan 58
4.2 Rencana Tindaklanjut 58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai pada DPMPPA Kota Jambi 12
Tabel 1. 2 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya per 31 Desember 2024 13

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis DPMPPA Kota Jambi Tahun 2024-2026 19
Tabel 2. 2 Strategi, Program dan Kegiatan 21
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 255
Tabel 2. 4 Target Belanja DPMPPA Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2024 27
Tabel 2. 5 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis 28
Tabel 2. 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 29

Tabel 3. 1 Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja..... 33
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2024..... 34
Tabel 3. 3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024 38
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024..... 41
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja..... 43
Tabel 3. 6 Analisis Efisiensi 48
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Belanja DPMPPA 52
Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Belanka per Sasaran Tahun 2024 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi 9

Gambar 3. 1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dibanding Target..44

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masayarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rencana Pembangunan Daerah periode tahun 2024 – 2026 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi berdasarkan dengan rencana strategis perubahan tahun 2024 – 2026 dan rencana kinerja tahun 2024 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 yang diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi;
2. Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, adalah sebagai Berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

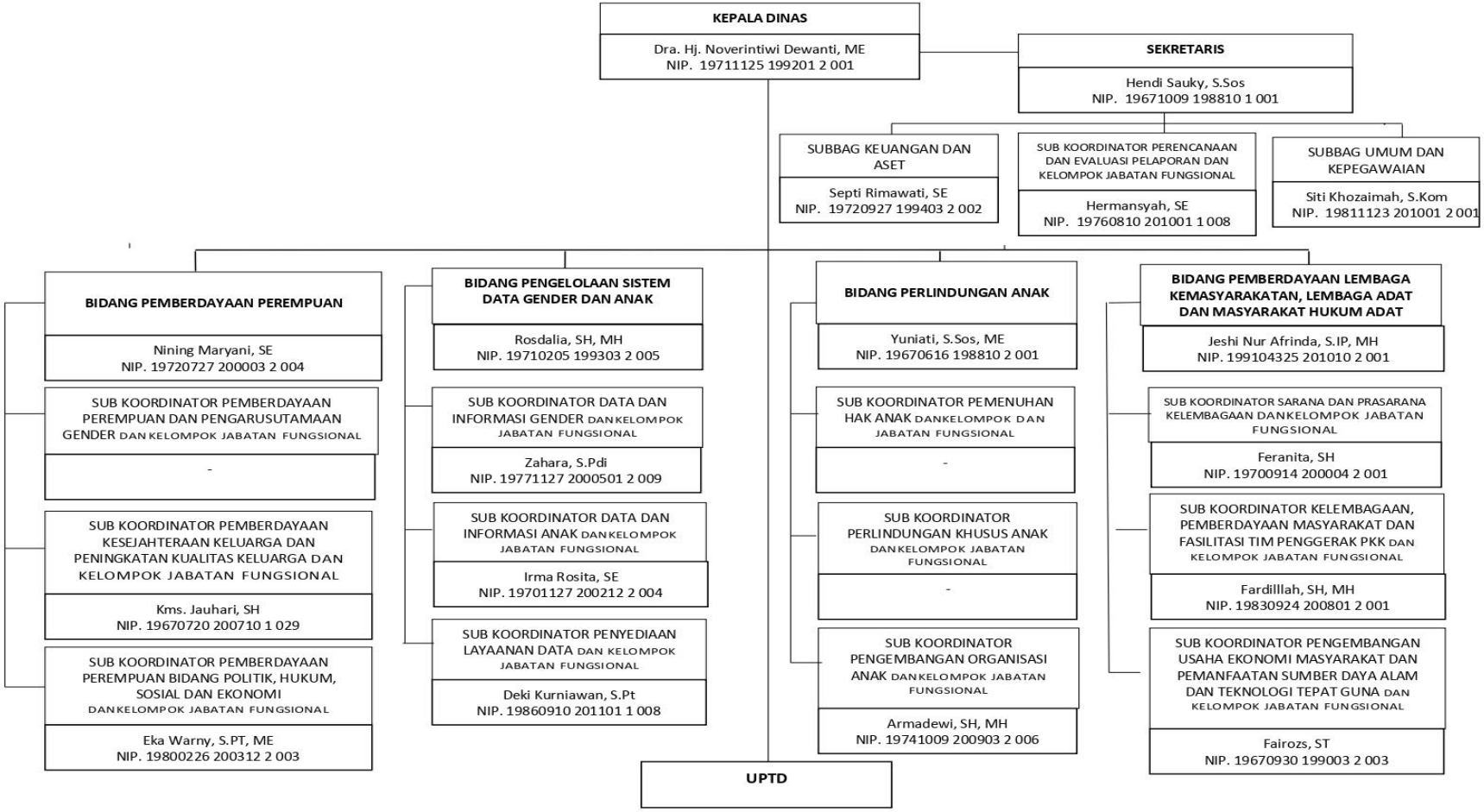

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, yang diturunkan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam penyelenggaraan tugas dan kewajiban tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi, dipimpin oleh Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi sesuai dengan peraturan walikota di atas.

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan pengembangan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan karena keterbatasnya akses masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam lokal.
3. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam pengembangan dan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas.

4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan karena masih rendahnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat.
5. Belum optimalnya kepedulian masyarakat dan kegiatan pelestarian adat dan budaya.
6. Masih kurangnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda, dampaknya terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan masih terjadi netral gender dan terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
7. Masih ditemukannya peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak.
8. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan.
9. Masih kurangnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang ketenagakerjaan yaitu di legislatif, eksekutif dan kelembagaan swasta.
10. Masih adanya kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking/TPPO), kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, pencabulan, penelantaran, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena masih banyaknya Masyarakat yang tidak berani mengadukan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang mereka alami karena menganggap hal tersebut adalah aib sehingga banyak kasus yang belum terungkap.
11. Masih adanya kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking).
12. Masih adanya kasus tenaga kerja anak dibawah umur.
13. Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
14. Pelecehan seksual dan pencabulan serta penelantaran dan kekerasan terhadap anak masih terjadi.
15. Masih tingginya angka pernikahan anak yang disebabkan oleh pergaulan bebas.
16. Maraknya perilaku anak dalam aktivitas geng motor.

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi memiliki sumber daya manusia dengan jumlah 91 Orang. Pada Tahun 2024 terdapat 91 Pegawai yang terdiri dari 48 Orang PNS dan 43 Orang Tenaga Honorer/Kontrak. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai perempuan yaitu sebanyak 60% (50 Orang) dan sisanya sebanyak 40% merupakan pegawai perempuan (34 Orang).

Tabel 1. 1

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Jambi Tahun 2024

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	4
4.	Kepala Sub Bagian	IV.a	2
5.	Staf Fungsional Tertentu	IV.a	11
6.	Kepala UPTD	IV.a	32
7.	Kasubbag TU UPTD	IV.b	1
8.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	IX	18
9.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	VII	3
10.	Staf Fungsional Umum	-	6
11.	Pegawai Jasa Kerja Kontrak	-	43
Jumlah		**-**	91

Sumber: Subbag Kepegawaian DPMPPA Kota Jambi Tahun 2024

1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 1. 2

Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2024

No	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Roda Dua	17
2	Roda Empat	10
3	Komputer PC	14
4	Lap Top	67
5	Printer	42
6	Kamera Digital	1
7	Telepon PABX system 4 line	1
8	Kursi kerja sandaran tinggi	72
9	Kursi kerja sandaran rendah	2
10	Kursi komputer	6
11	Kursi lipat	108
12	Meja komputer	9
13	Meja ½ biro	34
14	Meja Biro	15
15	Meja Rapat	4
16	Lemari Arsip	11
17	Kursi Tamu	9
18	Kursi Lipat	70
19	Kursi Rapat	100
20	TV	2
21	Faxsimile	1
23	AC	37
24	Dispenser	10

25	Papan Data	4
26	Lambang Negara	2
27	Bendera Merah Putih	1
28	Magic Jar	1
29	Brankas	1
30	Jam Dinding	6
31	Papan Pengumuman	3
32	Rak Gantung	1
33	Hardisk External	11
34	Alat Pemadam Kebakaran	2
35	Teralis	1
36	Hordeng	2
37	Besi Rell	1
38	Lemari Pakaian	1
39	Lemari Cenderamata	1
40	Lemari Galeri Sekretariat PKK	2
41	Karpet	25
42	Panggung Pelaminan Adat	1
43	Infokus	2
44	Papan Merk	1

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar **Rp 12.089.734.000**. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategis pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024 - 2026. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam mendukung Rencanan Pembangunan Daerah Kota Jambi yang tertuang dalam Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024 - 2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 – 2026 tidak terlepas dari kesuskesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Kota Jambi Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024 – 2026

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026. Adapun Visi yang tercantum dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

“KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG DAN JASA, YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 14 (empat belas) misi pembangunan Kota Jambi :

1. Mewujudkan pembangunan kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.

2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi
4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah
9. Mewujudkan kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

14. Menciptakan kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2024 – 2026 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan Pelayanan Prima, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Kota Jambi mendukung misi "Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak".

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Dokumen perencanaan. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Kota Jambi dari Tahun 2024-2026 adalah "Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Semua Aspek Pembangunan di Kota Jambi serta Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak."

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDP dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 - 2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	2024	2025	2026
Meningkatnya Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Lembaga dan Organisaasi Yang Aktif : 5 x 100%	90	91	92
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan : Jumlah Plenduduk perempuan x 100.0000	0,011	14,38	14,00
	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	Jumlah Perempuan dan Anak yang mengalami Kekerasan : Jumlah Perempuan dan Anak yang mengalami	100	100	100
Tercapainya Standar APE	Predikat APE	Penilaian APE berdasarkan 7 prasyarat : 1. Komitmen 2. Kebijakan 3. Pelembagaan 4. Sumber Daya. 5. Data Terpilih 6. Alat Analysis 7. Partisipasi Masyarakat	Nindya	Nindya	Nindya
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kota Layak Anak	Jumlah Total Nilai 5 Variabel KLA x 100% : Konstanta 1000	Nindya	Nindya	Utama
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	Jumlah Jenis Data Gender dan Anak	Seluruh Jenis Data Gender dan anak yang ada di Aplikasi SIGA	46	46	46

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi pada tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Strategi, Program dan Kegiatan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Meningkatnya Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang

		Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	- Perlindungan Perempuan - Perlindungan Khusus Anak	- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten atau Kota / - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten atau Kota / - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten atau Kota

		- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten atau Kota / Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tercapainya Standar APE	- Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga	- Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten atau Kota / Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten atau Kota / Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan

		Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten atau Kota / Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten atau Kota / Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten atau Kota
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	- Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di

		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dananggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penguatan kelembagaan dan , pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	90
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Rasio	0,011
	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	Persen	100

Tercapainya Standar APE	Predikat APE	Predikat	Nindya
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	Jumlah Jenis Data Gender dan Anak	Jenis	46

Untuk mencapai Sasaran 1 “Meningkatnya Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” didukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Sasaran 2 “Meningkatnya Perlindugan Terhadap Perempuan dan Anak” didukung oleh Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak yang memiliki indikator cakupan anak dan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA dimana indikator tersebut dapat digunakan untuk mendukung indikator sasaran 2 yaitu persentase penyelesaian dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Untuk mencapai Sasaran 3 “Tercapainya Standar Anugerah Parahita Ekapraya (APE)” didukung oleh dua program yang pertama adalah Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota. Selanjutnya program kedua adalah Peningkatan Kualitas Keluarga dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

Sasaran 4 “Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak” didukung oleh Program Pemenuhan Hak Anak dengan kegiatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang memiliki indikator kegiatan persentase cakupan Kota Layak Anak.

Sasaran 5 “ Meningkatnya Kualitas Data Gender dan Anak” yang didukung oleh Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persen	90
Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	Persen	100
Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	Persen	100
Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi	Persen	55
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas	Persen	45
Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	80
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Data Gender dan Anak	Persen	35

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 12.536.220.000,- dengan rincian belanja operasional sebesar Rp 11.508.982.688,- dan Belanja Modal sebesar Rp 1.027.237.312,-. Sedangkan anggaran perubahan menjadi Rp 12.089.734.000 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 10.896.661.739 dan belanja modal sebesar Rp 1.193.072.261.

Tabel 2. 4
Target Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2024

URAIAN	TARGET	PERSENTASE
Belanja Operasional	10.896.661.739	94,51%
Belanja Modal	1.193.072.261	99 %
Jumlah	12.089.734.000	100%

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5

Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
1.	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.485.630.831	27,8 %
2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Perlindungan Perempuan	257.679.541	2,06 %
		Perlindungan Khusus Anak	504.947.062	4,03 %
3	Tercapainya Standar APE	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	644.520.390	5,14 %
		Peningkatan Kualitas Keluarga	211.452.860	1,69 %
4.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Pemenuhan Hak Anak	295.626.345	2,36 %
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	252.157.649	2 %

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 7 program yang terdiri dari 19 kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut:

Tabel 2. 6
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

RENCANA AKSI DAERAH DPMPPA 2024

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				CAPAIAN KINERJA				Program	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	PENANANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
			TR1	TR2	TR3	TR4	TR1	TR2	TR3	TR4								TR1			TR2			TR3			TR4		
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia di DPMPPA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	5	3	0	0	5				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,252,188	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Perencanaan dan Evaluasi												
			5	0	2	3	2						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46,491,159	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan														
			30	30	30	30	27					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,931,397,465	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	Keuangan dan Aset												
			10	9	9	9	18						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	373,482,982	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37 Dokumen													
			3	3	3	3	4						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10,975,525	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwuanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen													
			0	94	0	0	0					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70,500,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket													
			0	2	2	0	0						Bimbingan Teknis Implemintasi Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang													
			4	5	5	4	0					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	16,094,323	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket													
			1	1	1	1	2						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	247,320,538	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket													
			2	2	2	3	0						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,523,450	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket													
			5	6	7	7	10						Fasilitasi Kunjungan Tamu	21,950,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan													
			15	25	25	15	3						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214,700,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan													
			500	500	500	500	550						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	42,808,548	Jumlah Dokumen Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen													
			2	1	1	1	2					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	647,289,998	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	5 Unit													
			0	2	1	2	0						Pengadaan Mebel	56,433,159	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	Umum dan Kepegawaian												

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				CAPAIAN KINERJA				Program	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	PENANANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
			TR1	TR2	TR3	TR4	TR1	TR2	TR3	TR4								TR1			TR2			TR3			TR4		
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1	1	1	0	1						Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	112,011,404	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen														
			0	0	2	1	1						Fasilitasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	162,170,900	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan														
3	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran serta Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Peran serta Perempuan dalam Pembangunan	8	8	12	11	3				Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	183,618,671	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Perangkat Daerah														
			39	39	39	39	1					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenanan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	460,901,570	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Organisasi														
			1	2	2	1	1				Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	161,952,806	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan														
			180	0	0	0	62					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49,492,560	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang														
			1	1	1	1	1				Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	123,040,510	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen														
			1	1	1	1	1						Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	129,116,865	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen														

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				CAPAIAN KINERJA				Program	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	PENANANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
			TR1	TR2	TR3	TR4	TR1	TR2	TR3	TR4								TR1			TR2			TR3			TR4		
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5	5	7	6	0						Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	323,514,155	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit													
			65	60	65	60	0					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21,564,800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan													
			9	9	9	9	3						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan													
			0	2	2	1	0						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17,800,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Laporan													
			21	21	21	21	21					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259,082,800	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit													
			5	5	5	5	5						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	89,840,720	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit													
			10	17	10	10	8						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76,539,200	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit													
			0	1	1	0	0						Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147,663,013	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit													
2	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1	0	3	1	1				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	394,371,339	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	Bidang PLKLAMHA												
			0	0	1	0	0						Fasilitasi Bulan Bakti Gotongroyong Masyarakat	55,309,664	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan													
			2	0	0	1	0						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1,138,191,717	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen													
			0	150	0	0	0						Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1,623,565,610	Jumlah Sarana dan Prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150 Unit													
													Fasilitasi Pengembangan Usaha		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi													

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERIA	TARGET KINERJA SASARAN				CAPAIAN KINERJA				Program	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	PENANANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
			TR1	TR2	TR3	TR4	TR1	TR2	TR3	TR4								TR1			TR2			TR3			TR4		
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kota Layak Anak	5	6	8	3	0				Program Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	295,626,103	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	22 Organisasi, 11 Kecamatan, 62 Kelurahan	Bidang Perlindungan Anak											
5	Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapatkan Pelayanan dan Penanganan	2	2	0	0	23				Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	99,449,535	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak terpadu	4 kegiatan	Bidang Perlindungan Anak											
			9	12	15	11	20					Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	143,139,393	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	UPTD PPA											
			5	6	5	6	0						Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	193,338,000	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	22 Orang													
			60	0	0	0	0					penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kanupaten/Kota	69,019,789	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang Terlatih dan Mendapatkan Setirfikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	60 orang													
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO	0	0	1	1	0				Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101,499,660	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	2 Dokumen													
			15	13	10	10	20					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	114,037,881	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	48 orang													
6			5	6	5	6	20						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	42,142,000	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	22 layanan													
														12,536,220,000															

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3. 1

Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

NO	KATEGORI	RATA-RATA %CAPAIAN
1	Sangat Baik	≥ 90
2	Baik	75,00 – 89,9
3	Cukup	65,00 – 74,99
4	Kurang	50,00-64,99
5	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\textbf{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Target}} \textbf{ x 100\%}$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kelembagaan yang dibina x 100% : Semua Lembaga masyarakat yang terdata	90%	90,3 %	100%
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan : Jumlah Penduduk Perempuan x 100.000	0,011	25,84	
	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	Jmlh korban kekerasan perempuan dan anak : Jumlah Kekerasan yang di tangani x 100%	100 %	100 %	100 %
Tercapainya Standar APE	Predikat APE	Penilaian APE berdasarkan 7 prasyarat : 1. Komitmen 2. Kebijakan 3. Pelembagaan 4. Sumber Daya. 5. Data Terpilih 6. Alat Analysis 7. Partisipasi Masyarakat	Nindya	-	-
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kota Layak Anak	Jumlah Total Nilai 5 Variabel KLA x 100% : Konstanta 1000	Nindya	-	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	Jumlah Jenis Data Gender dan Anak	Jumlah Jenis data yang ada di aplikasi SIGA	46	46	100%

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2024, indikator persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki realisasi sebesar capaian 100% dari target sebesar 90%, sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Cara pengukuran indikator ini yaitu dengan perhitungan : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) = 91,18 %, dari 68 kelurahan LPM yang sudah terbentuk hanya 62 Kelurahan yang

Aktif, untuk Kelompok Pemberdayaan Masayarakat (KPM) dari 68 Kelurahan yang ada baru 41 Kelurahan yang terbentuk KPM = 60,29 %, sedangkan untuk RT = 1650, PKK= 79 terdiri dari 11 kecamatan dan 68 Kelurahan dan Lembaga Adat Melayu (LAM) =79 semuanya sudah terbentuk dan aktif 100% . (91,18%+100%+100%+100%+60,29 % : 5 x 100 %= 90,3%),

Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO memiliki realisasi Rasio tahun 2024 25,84 dari target Renstra 0,011 tidak mencapai target yang di tentukan dikarenakan tahun 2024 ini terjadi peningkatan kasus kekerasan perempuan berdasarkan laporan yang masuk di UPTD PPA tercatat Tahun 2024 ada 82 kasus kekerasan terhadap perempuan, bila di bandingkan dengan tahun 2023 data kekerasan terhadap perempuan hanya 45 Kasus. Bila di lihat angka tersebut terjadi peningkatan kasus 100%. sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Kurang.

Indikator persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang di tangani memiliki realiasi sebesar dengan capaian 100% dari target sebesar 100% karena setiap ada kasus yang diterima melalui laporan masyarakat (pengaduan) ke UPTD PPA maka akan dilayani dan ditangani serta didampingi oleh petugas UPTD PPA hingga kasus tersebut selesai, sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah penghargaan Pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah yang berhasil dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Tahun 2023 Kota Jambi menerima penghargaan atas capaian pelaksanaan pengarusutamaan gender kategori Madya. Penilaian untuk penghargaan Parahita Ekapraya dilakukan 2 (dua) tahun sekali. Untuk tahun 2024 tetap dilakukan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Hasil evaluasi untuk Kota Jambi tahun 2024 berada pada nilai estimasi 944,91 dari nilai maksimal 1000. Hasil evaluasi juga merupakan bahan acuan untuk penilaian Penghargaan Parahita Eka Praya (PPE) di tahun 2025. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik

Beberapa faktor penghambat yang masih menjadi kendala untuk naik peringkat adalah :

1. Perangkat daerah belum semua yang memiliki dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG)
2. Belum semua perangkat daerah antusias menyusun dokumen PPRG dari program kegiatan di masing-masing perangkat daerah.
3. Belum digunakan analisis gender dalam perencanaan pembangunan
4. Masih minimnya SDM perangkat daerah yang mamahami dan mampu dalam menyusun Perencanaan, Penganghgaran yang Responsif Gender (PPRG).
5. Adanya ketentuan standarisasi terhadap beberapa program kegiatan dari Kementerian PPA yang menjadi salah satu pertanyaan pada indikator evaluasi penilaian PPE yang belum terpenuhi oleh Kota Jambi.

Target dari sasaran Indikator Peningkatan pemenuhan hak anak pada tahun 2024 adalah penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan kategori madya dengan range nilai 700 sampai dengan 800 dengan presentase 80 %, dalam evaluasi mandiri Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 Pemerintah Kota Jambi mencapai nilai sebesar 938,73 dari nilai maksimal 1000 , Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Proes selanjutnya verifikari KLA oleh DP3AP2A provinsi , dari hasil verifikasi tersebut DP3AP2A Provinsi mengusulkan ke Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan nilai Verifikasi mencapai 938,73 dengan usulan peringkat katagori ***Utama*** dengan persentase standar KLA sebesar 90% , hasil akhir dari evaluasi KLA tersebut akan diberikan oleh Kementrian PPPA pada Tahun 2025 melalui proses verifikasi lapangan yang akan di laksanakan pada bulan Februari 2025 dan penghargaan KLA akan diberikan pada Hari Anak Nasional bulan Juli Tahun 2025.

Data gender dan anak adalah data yang menyajikan informasi terkait hubungan relasi, status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan, serta kondisi anak perempuan dan anak laki-laki. Data gender dan anak penting untuk mendukung pengarusutamaan gender (PUG) dan keberhasilan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Data Gender dan Anak adalah Data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan .Data mengenai kondisi anak perempuan dan anak laki-laki yang terpilah menurut kategori umur

Target dari Sasaran Meningkatnya Kulitas Data Gender dan Anak pada Tahun 2024 belum mengalami peningkatan. Jenis Data yang ada di Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Jambi belum ada penambahan data dari 46 Jenis data yang ada di Sistem Informasi Dender dan Anak.

Adapun jenis-jenis data yang ada di Sistem Informasi data Gender dan Anak adalah sebagai berikut :

Data SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)

No	Jenis Data
1	Kemampuan Baca dan Menulis Penduduk Kota Jambi Usia 15 Tahun
2	Auditor Inspektorat Kota Jambi
3	Data Anak yang mendapatkan Imunisasi
4	Data Indikaor Pariwisata dan Kebudayaan
5	Data Indikator Perhubungan
6	Data Kepemudaan dan Olahraga
7	Data IDG
8	Data IPG
9	Data IPM
10	Jumlah anggota DPRD
11	Jumlah angkatan kerja terdata
12	Jumlah guru yang memiliki sertifikasi
13	Jumlah kader KB berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin
14	Jumlah kasus kematian bayi
15	Jumlah kasus stunting
16	Jumlah kelahiran Bayi
17	Jumlah kematian Ibu melahirkan
18	Jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin
19	Jumlah koperasi terdaftar
20	Jumlah pejabat fungsional tertentu
21	Jumlah pemakai alat kontrasepsi
22	Jumlah peminjam buku
23	Jumlah pencari kerja terdaftar
24	Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin
25	Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin
26	Jumlah penerima bantuan pemugaran rumah yang tidak layak huni melalui APBD Kota Jambi
27	Jumlah penerima bantuan pemugaran rumah yang tidak layak huni melalui APBD Provinsi Jambi
28	Jumlah penerima bantuan pemugaran rumah yang tidak layak huni melalui APBN
29	Jumlah penerima bantuan pemugaran rumah yang tidak layak huni melalui CSR
30	Jumlah pengangguran terdata
31	Jumlah pengelola perpustakaan
32	Jumlah pengunjung perpustakaan
33	Jumlah penyuluh KB

34	Jumlah pimpinan komisi di DPRD Kota Jambi
35	Jumlah PNS berdasarkan eselon
36	Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin
37	Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat
38	Jumlah PPPK
39	Jumlh siswa berdasarkan jenjang Pendidikan
40	Junlah tenaga kerja migran yang terdata
41	Jumlah tenaga kerja kesehatan
42	Jumlah tenaga medis
43	Jumlah ketua ormas berdasarkan jenis kelamin
44	Jumlah pekerja terkena PHK yang terdata
45	Jumlah pengawas pemerintahan pada inspektorat Kota Jambi
46	Data auditor Inspektorat berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel 3. 3
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA CARA PENGUKURAN INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	KPM + LPM + LAM + RT+ PKK + RT : 5 x 100%	90 %	90,3 %	100%
Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Pemenuhan 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak	80%	93,84%	117,3%
Pengarustamaaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi	Jumlah OPD yg melaksanakan PUG: jumlah seluruh OPD	55 %	56 %	101,8%

Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas	Jumlah kualitas keluarga : jumlah kepala rumah tangga x 100%	45%	66,48 %	148,5 %
Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Data Gender dan Anak	Jumlah Kualitas dan Kuantitas data : Nilai Seluruh data sesuai Indikator x 100 %	35%	35%	100%
Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	Jumlah kekerasan terhadap perempuan : Jumlah Kekerasan Perempuan yang di tangani x 100%	100%	100%	100%
Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh UPTD PPA	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak : Jumlah anak Korban Kekerasan yang Tangani x 100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2024, indikator Program persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat memiliki realisasi sebesar dengan capaian 100% dari target sebesar 90%, Cara pengukuran indikator ini yaitu dengan perhitungan : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) = 91,18 %, dari 68 kelurahan LPM yang sudah terbentuk hanya 62 Kelurahan yang Aktif, untuk Kelompok Pemberdayaan Masayarakat (KPM) dari 68 Kelurahan yang ada baru 41 Kelurahan yang terbentuk KPM = 60,29%, sedangkan untuk RT = 1650, PKK= 79 terdiri dari 11 kecamatan dan 68 Kelurahan dan Lembaga Adat Melayu (LAM) =79 semuanya sudah terbentuk dan aktif 100% . (91,18%+100%+100%+100%+60,29% : 5 x 100 %= 90,3%),

Indikator persentase pemenuhan hak anak dengan realisasi capaian 117,3%, dalam evaluasi mandiri Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 Pemerintah Kota Jambi mencapai nilai sebesar 938,73 atau 93,84 % dari nilai maksimal 1000 , capaian kinerja ini naik dari tahun 2023 dari target 80% yang telah di tentukan Tahun 2024.

Indiaktor program Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi. PUG adalah strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Jambi cukup baik, dapat terlhat dari komitmen perangkat daerah dalam membentuk SK Focal Point dan menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender terhadap program kegiatan di masing-masing OPD. Capaian PUG Kota Jambi mengalami peningkatan, persentasenya meningkat dari 46% di tahun 2023 menjadi 56% di tahun 2024. Capaian ini

melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah mulai memahami pelaksanaan PUG dan penyusunan anggaran yang responsig gender. Diharapkan di tahun yang akan datang dapat tercapai 100% perangkat daerah yang memiliki dokumen anggaran yang responsif gender (ARG)

Capaian Indikator Program Cakupan Keluarga berkulaitas tahun 2024 (Indekks Kualitas Keluarga) Capaian kualitas keluarga (Indeks Kualitas Keluarga) Kota Jambi cukup baik (berkembang) .Pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga . Indeks Kualitas Keluarga kota Jambi berada pada angka 66,48. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian 2 tahun terakhir. Lebih spesifik lagi mengenai angka tersebut menggunakan 3 indikator iBangga. Indeks ketentraman kota Jambi berada di 64,37 dinilai berdasarkan,

menjalankan ibadah, memiliki akta nikah anak berusia 6-17 memiliki akta lahir, memiliki jamkes, tidak ada konflik keluarga, KK tidak cerai hidup. Indeks kemandirian Kota Jambi berada di angka 60,07 dinilai berdasarkan, memiliki penghasilan, makan beragam, rumah banyak huni,memiliki aset, anak usia 7-18 tahun tidak putus sekolah, tidak ada anggota keluarga yang sakit/disabilitas dan akses media online. Kemudian indeks kebahagiaan Kota Jambi berada pada angka 75 dinilai dari, interaksi antar keluarga pada 6 bulan terakhir, pengasuhan anak bersama pada 6 bulan terakhir, rekreasi keluarga pada 6 bulan terakhir dan ikut serta gotong royong di lingkungan RT pada 6 bulan terakhir. Indeks pembangunan keluarga 2023 Kota Jambi lebih tinggi dari Provinsi dan nasional dengan angka 66,48 nasional 61 sementara Provinsi 50-an

Indikator cakupan data gender dan anak memiliki realiasi sebesar dengan capaian 100% dari target sebesar 35%, capaian ini sesuai dengan yang telah di tartgetkan dalam renstra

Indikator program cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh UPTD PPA memiliki realiasi sebesar dengan capaian 100% dari target sebesar 100%, capaian ini sesuai dengan yang telah di tartgetkan

Indikator persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh UPTD PPA memiliki realiasi sebesar dengan capaian 100% capaian ini sesuai dengan target yang telah di tentukan sebesar 100 %.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3. 3

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024%

INDIKATOR SASARAN	2023			2024			PERSENTASE REALISASI 2024 TERHADAP REALISASI 2023
	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	
Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	89,12%	89%	100%	90,3 %	90%	100,3%	101,3%
Persentase penyelesaian dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO	14,38	0,020	-	25,84	0,011	-	
Tercapainya standar APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Madya 947,78	Nindya (700-800)	Madya 84,41%	944,91	Nindya (700-800)	118,11%	139,9%
Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Madya (684,50)	Nindya (701 -800)	85,56%	938,73	Nindya (701 -800)	117,3%	137,10%
Meningkatnya Kulaitas Data Gender dan Anak	-	-	-	46	46	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah sebesar 101,3%. Capaian kinerja tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra. Capaian kinerja tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023. Capaian kinerja indikator persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebesar 90,29% dari target sebesar 90%.Cara pengukuranindikator ini yaitu dengan perhitungan : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) = 90,18 %, dari 68 kelurahan LPM yang sudah terbentuk hanya 60 Kelurahan yang Aktif, untuk Kelompok Pemberdayaan Masayarakat (KPM) dari 68 Kelurahan yang ada baru 39 Kelurahan yang terbentuk KPM = 60,29%, sedangkan untuk RT = 1650, PKK= 79 terdiri dari 11 kecamatan dan 68 Kelurahan dan Lembaga Adat Melayu (LAM) =79 semuanya sudah terbentuk dan aktif 100% . (90,18%+100%+100%+100%+60,29% : 5 x 100 %= 90,3%),

Capaian realisasi Indikator persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2024 sama dengan dari tahun 2023.

Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 adalah 179%, Capaian kinerja tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023. karna skala perhitungan yang dipakai adalah skala perhitungan kuantitatif (rasio). Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak yang cukup signifikan pada tahun 2024. berdasarkan laporan yang masuk di UPTD PPA tercatat Tahun 2024 ada 82 kasus kekerasan terhadap perempuan, bila di bandingkan dengan tahun 2023 data kekerasan terhadap perempuan hanya 45 Kasus. Bila di lihat angka tersebut terjadi peningkatan kasus 179%.

Realisasi indikator Tercapainya Standar APE (Anugerah Parahita Ekapraya) tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah sebesar 101,3%. Capaian kinerja tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023. Penghargaan Pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah yang berhasil dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Tahun 2023 Kota Jambi menerima penghargaan atas capaian pelaksanaan pengarusutamaan gender kategori Madya. Penilaian untuk penghargaan Parahita Ekapraya dilakukan 2 (dua) tahun sekali. Untuk tahun 2024 tetap dilakukan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Hasil evaluasi untuk Kota Jambi tahun 2024 berada pada nilai estimasi 944,91 dari nilai maksimal 1000. disandingkan dengan target pada Renstra maka telah tercapai Hasil evaluasi juga merupakan bahan acuan untuk penilaian Penghargaan Parahita Eka Praya (PPE) di tahun 2025.

Capaian kinerja indikator persentase standar KLA dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah sebesar 112,5%. capaian ini lebih tinggi dari tahun 2023. Dalam evaluasi mandiri Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 Pemerintah Kota Jambi mencapai nilai sebesar 938,73 dari nilai maksimal 1000 , proes selanjutnya verifikasi KLA oleh DP3AP2A provinsi , dari hasil verifikasi tersebut DP3AP2A Provinsi mengusulkan ke Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan nilai Verifikasi mencapai 938,73 dengan usulan peringkat katagori ***Utama*** dengan persentase standar KLA sebesar 90% , hasil akhir dari evaluasi KLA tersebut akan diberikan oleh Kementrian PPPA pada Tahun 2025 melalui proses verifikasi lapangan yang akan di laksanakan pada bulan Februari 2025 dan penghargaan KLA akan diberikan pada Hari Anak Nasional bulan Juli Tahun 2025.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Tahun 2024-2026

INDIKATOR SASARAN	2024		2025		2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	90 %	90,3%	91 %	-	92 %	-
Persentase penyelesaian dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	-	100%	-
Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO	0,011	25,84	14,38	-	14,10	-
Tercapainya standar APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	NIndya (701 – 800	944,91	NIndya (701 – 800	-	Utama (90%)	-
Predikat Kota Layak Anak (KLA)	NIndya (701 – 800)	938,73	NIndya (701 – 800)	-	Utama (90%)	-
Meningkatnya Kulaitas Data Gender dan Anak	46	46	47	-	48	-

Dari tabel diatas juga dapat dicermati bahwa realisasi tahun 2024 Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut disandingkan dengan target Renstra 2024 maka telah tercapai. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) = 90,18 %, dari 68 kelurahan LPM yang sudah terbentuk hanya 60 Kelurahan yang Aktif, untuk Kelompok Pemberdayaan Masayarakat (KPM) dari 68 Kelurahan yang ada baru 39 Kelurahan yang terbentuk KPM = 60,29%, sedangkan untuk RT = 1650, PKK= 79 terdiri dari 11 kecamatan dan 68 Kelurahan dan Lembaga Adat Melayu (LAM) =79 semuanya
sudah terbentuk dan aktif 100% . (90,18%+100%+100%+100%+60,29% : 5 x 100 %= 90,3%).

Realisasi Indikator persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra maka telah tercapai 100 %. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dibagi jumlah kekerasan perempuan dan anak yang ditangani dikali 100% sama dengan 100 % (177/ 177 x 100% =100%).

Realisasi tahun 2024 Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO dibandingkan dengan target renstra maka belum tercapai. Hal ini disebabkan tingginya kasus kekerasan perempua dan anak pada tahun 2024

Realisasi tahun 2024 Tercapaianyan standar APE tersebut bila dibandingkan dengan target restra maka telah tercapai. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra.

Realisasi tahun 2024 Predikat Kota Layak Anak (KLA) bila dibandingkan dengan target restra maka telah tercapai. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra.

Realisasi tahun 2024 Meningkatnya Kualitas Data Gender dan Anak bila di bandingkan dengan target Renstra maka telah tercapai.

Gambar 3. 1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dibanding Target

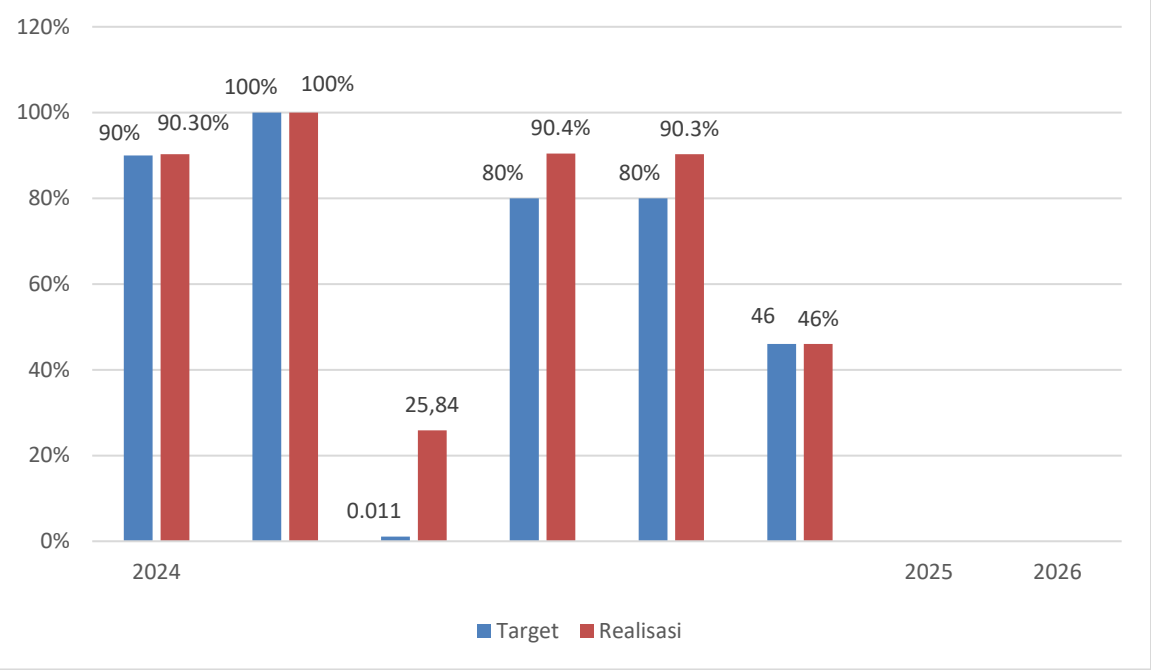

Berdasarkan grafik 3.1, diketahui bahwa ada 6 (enam) indikator sasaran, capaian indikator sarasaran pertama persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada tahun 2024 adalah 90,3% dari target 90%.

Selanjutnya capaian Indikitor kedua persentase penyelesaian dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah 100 % dari target 100%.

Capaian Indikator yang ketiga rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO target 0,011 dan realisasi tahun 2024 sebesar 25,84.

Sasaran keempat Tercapainya standar APE(Anugrah Parahita Ekapraya) capaian hasil

evaluasi untuk Jambi mendapatkan nilai sebesar 944,91 dari nilai maksimal 1000, dengan persentase 113 %. namun penetapan pridikat APE akan dilakukan pada Tahun 2025

Capaian kinerja indikator kelima predikat Kota Layak Anak KLA mendapatkan nilai 938,73 (90%) melaluia evaluasi mandiri KLA dengan predikat Utama dari target sebesar 80% (Nindya) yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 112,5 %, capaian ini naik dari tahun lalu.

Capaian kinerja indikator keenam Meningkatnya Kualitas Data Gender masih sam dengan tahun sebelumnya.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET NASIONAL/ PROVINSI	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	90 %	90,3%	178,24%
2	Persentase penyelesaian dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100 %	100%
3	Predikat APE	-	944,91	-
4	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	11 Kab/Kota	938,73	-
5	Jumlah Data Gender dan Anak	100%	46	100

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi Indikator Sasaran tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dengan target standar provinsi maka dapat dilihat untuk sasaran penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengalami peningkatan sebesar 178,24% bila di bandingkan Target dari Sasaran Provinsi sebesar 50 %.

Capaian sasaran persentase standar Kota Layak Anak (KLA) bila dibandingkan dengan target Provinsi dengan Sasaran Persentase Kab/Kota Layak Anak yang capaian bisa di hitung karna adanya perbedaan target yang di tetapkan. Dimana target yang di teapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah persentase sedangkan target yang di tetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi adalah jumlah. namun kedua sasaran tersebut memiliki keterkaitan dan tujuan yang sama.

Capaian Sasaran Persentase peningkatan kesejahteraan perempuan tidak bisa bandingkan karna memiliki sasaran yang berbeda.

Capaian Persentase penyelesaian dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2023 dalah 100% bila dibandingkan target Sasaran Provinsi Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak sebesar 100%

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tantangan dalam pemberdayaan dengan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak Kota Jambi semakin dapat dirasakan dengan banyaknya kemajuan teknologi informasi dan peningkatan pendidikan dan pengetahuan rata-rata masyarakat. Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yaitu:

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dalam pembangunan adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran serta perempuan antara lain disebabkan oleh:
    - Terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya.
    - Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik dan ekonomi.
    - Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial.
2. Meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindakan kekerasan, dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hal ini belum terlaksana dengan baik dimana permasalahan yang dihadapi antara lain:
    - Masih rendahnya pemahaman perempuan tentang hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.
    - Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia UPTD PPA dalam memberikan pelayanan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap perempuan.
    - Belum optimalnya kelompok PKDRT di Kecamatan dan Kelurahan.
    - Belum adanya mekanisme yang tepat dalam penyelesaian masalah.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Penggarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas hidup dan peranan perempuan antara lain yaitu sebagai berikut:

    - Belum optimalnya penerapan peranti hukum dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan
    - Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
    - Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.
    - Belum optimalnya koordinasi Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG).

4. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak:
    - Belum optimalnya penerapan hukum
    - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan wilayah ramah anak
    - Belum optimalnya Kerjasama dan koordinasi tentang sectoral dalam pemenuhan hak-hak anak.
    - Masih banyaknya kasus kekerasan pada anak.

5. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan:
    - Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan dalam peningkatan usaha ekonomi bagi masyarakat
    - Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi serta kelembagaan dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif dan peran masyarakat dalam pembangunan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Meningkatkan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan
2. Penguatan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kelurahan
3. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna menuju pengembangan usaha ekonomi masyarakat
4. Menguatkan peran gugus tugas Kota Layak Anak (KLA)
5. Menguatkan peran focal point pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
6. pada perangkat daerah
7. Bidang Perlindungan Perempuan dan bidang Perlindungan anak telah melaksanakan

sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat kota Jambi tentang pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak di kota Jambi agar Masyarakat semakin paham dalam melindungi dan mencegah terjadinya kekerasan.

8. DPMPPA mengadakan pelatihan-pelatihan kepada Masyarakat baik manajemen maupun ketermpilan dan kegiatan lainnya agar Masyarakat bisa meningkatkan taraf hidupnya.
9. UPTD PPA telah membuat inovasi PITA MOLIN (Pelayanan, Informasi dan konsultasi melalui Mobil Perlindungan), yaitu Tim UPTD PPA terjun langsung ke sekolah-sekolah memberikan edukasi dan informasi tentang kekerasan terhadap Perempuan dan anak, mensosialisasikan adanya UPTD PPA Kota Jambi sebagai tempat pengaduan jika terjadi kekerasan, dengan inovasi diharapkan akan meminimalisasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Menguatkan peran focal point pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
11. Menguatkan peran organisasi perempuan dalam PKDRT.
12. Penguatan peran kelembagaan dan masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Perangkat Daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator Sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi pada tahun 2024:

Tabel 3. 5

Analisis Efisiensi

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR SASARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Tercapainya persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	98,85%	98,85%
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	96,22 %	96,22%

		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO	-234	94,94%	-40.57
3	Tercapainya Standart APE	Predikat APE	118,11	96,23 %	81.47%
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	117,34	99,56 %	84,85%
5	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	Jumlah Jenis Data Gender dan Anak	100%	95,26 %	95,26%

Indikator persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,85% sehingga indikator ini dapat dikatakan efisien karena memiliki tingkat efisiensi sebesar 98,85%.

Indikator Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak memiliki capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 96,22% sehingga indikator ini dapat dikatakan efisien karena memiliki tingkat efisiensi sebesar 96,22%.

Indikator Tercapainya Standart APE capaian kinerja sebesar 118,11% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 96,23% sehingga indikator ini dapat dikatakan efisien karena memiliki tingkat efisiensi sebesar 81,47%.

Indikator Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak capaian kinerja sebesar 117,34% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,56% sehingga indikator ini dapat dikatakan efisien karena memiliki tingkat efisiensi sebesar 84,85%.

Indikator Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 95,26% sehingga indikator ini dapat dikatakan efisien karena memiliki tingkat efisiensi sebesar 95,26%

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Tercapainya persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan didukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dimana pada program ini terdapat sub kegiatan:

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Sub kegiatan ini memiliki capaian berupa meningkatnya kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dimana capaian tersebut dapat mendukung tercapainya persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama untuk Lembaga kemasyarakatan.

- Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

  Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja berupa terlaksananya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja terlaksanya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

  Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja berupa terlaksanya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatam Teknologi Tepat Guna

  Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja berupa terlaksananya fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna

Untuk mencapai persentase penyelesaian dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didukung dengan:

- Program Perlindungan Perempuan

  Program ini memiliki indikator cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan, pada program ini terdapat kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota dengan indikator persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilayani dengan sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota dengan indikator jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilayani dan capaian kinerja berupa tersedianya layanan pengaduan

masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota. Capaian kinerja tersebut digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian penangan kasus terhadap perempuan.

- Program Perlindungan Khusus Anak

  Program ini memiliki indikator persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan. Program ini memiliki kegiatan:

  - Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota.
  - Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota dengan indikator persentase penanganan kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti. Pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian kinerja tersedianya layanan pengaduan masyarkat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.

Tercapainya Standar APE didukung oleh program Penggatusutamaan Gender dan program peningkatan kualitas keluarga. Dengan kegiatan :

- Program Penggarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

  Program ini memiliki indikator Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi memilki kegiatan :

  - Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota
- Program Peningkatan Kulaitas Keluarga

  Program Peningkatan Kulaitas Keluarga dengan indicator cakupan keluarga berkualitas memiliki kegiatan :

  - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
  - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kuliatas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota

Meningkatnya pemenuhan hak anak didukung oleh program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator persentase pemenuhan hak anak dengan kegiatan :

- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota

Meningkatnya Kualitas Data Gender dan Anak didukung oleh program Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator meningkatnya kulaitas dan kuantitas data gender dan anak dengan kegiatan :

- Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota
- Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota

3.2 Realisasi Anggaran 2024

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 95,58% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3. 6

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	7.047.102.305	6.482.612.911	91,99%
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.829.610.123	1.767.061.151	96,58%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.047.102.305	6.482.612.911	91,99%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.743.347	60.504.710	97,99%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.252.188	14.435.170	94,64%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.491.159	46.069.540	99,09%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.348.644.472	3.883.242.303	89,30%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.035.703.765	3.616.800.638	89,62%

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	301.965.182	255.914.900	84,75%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.975.525	10.526.765	95,91%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.500.000	87.620.000	91,75%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70.500.000	70.500.000	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	17.120.000	68,48%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	559.183.492	522.368.132	88,53%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.094.323	14.021.000	87,12%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.527.171	235.434.877	95,89%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.523.450	21.524.350	81,15%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.750.000	35.129.000	98,26%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.700.000	194.931.605	92,08%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.588.548	21.327.300	90,41%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.193.072.261	1.177.590.052	98,70%
Pengadaaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	597.900.000	597.900.000	99,80%
Pengadaan Mebel	160.103.274	154.885.000	96,74%
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	435.068.987	426.005.052	97,92%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.564.800	216.267.449	96,74%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.564.800	21.557.300	99,97%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.000.000	194.710.149	96,39%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565.393.933	535.020.265	94,63%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259.071.700	241.521.320	93,23%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.834.520	80.262.520	89,34%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.824.700	67.139.425	97,55%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.663.013	146.097.000	98,94%
Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	550.605.381	532.193.676	96,66%
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangn Kabupaten/Kota	129.103.811	119.761.956	92,76%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	129.103.811	119.761.956	92,76%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	421.501.570	412.431.720	97,85%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	421.501.570	412.431.720	97,85%
Program Perlindungan Perempuan	320.557.541	304.322.755	94,94%
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.499.660	101.495.000	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.499.660	101.495.000	100%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	219.057.881	202.827.755	92,59%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	91.537.881	82.112.755	89,70%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.520.000	120.715.000	94,66%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	154.675.366	146.548.900	94,75%
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujdukan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.232.806	102.846.900	93,30%
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	110.232.806	102.846.900	93,30%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.442.560	43.702.000	98,33%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.442.560	43.702.000	98,33%
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	181.552.375	172.944.586	95,26%
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	181.552.375	172.944.586	95,26%
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	85.575.510	81.665.036	95,43%
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	95.976.865	91.279.550	95,11%
Program Pemenuhan Hak Anak	244.300.743	243.232.950	99,56%
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	244.300.743	243.232.950	99,56%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	244.300.743	243.232.950	99,56%
Program Perlindungan Khusus Anak	377.918.717	367.818.284	97,33%
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	80.299.535	79.374.863	98,85%

Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA	80.299.535	79.374.863	98,85%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	228.599.393	220.289.590	96,36%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.639.393	119.353.890	98,93%
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	107.960.000	100.935.700	93,49%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.019.789	68.153.831	98,75%
Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.019.789	68.153.831	98,75%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran,pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 7

Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tercapainya persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	90%	90,3%	100%	100%	98,85%	98,85%
2	Meningkatnya perlindungan terhadap	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO	0,011	25,84	-234%	100%	94,94%	94,94%

	perempuan dan anak	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	100%	100%	100%	100%	96,23%	96,23%
3	Tercapainya Standar APE	Predikat APE	Nindya (701-800)	944,91	118,11	100%	90,04%	90,04%
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kota Layak Anak	Nindya (701-800)	938,73	117,34	100%	97,33%	97,33%
5	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	Jumlah Jenis Data Gender dan Anak	46	46	46	100%	95,26%	95,26%

Sasaran tercapainya persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 90,3% dari target 90%. Sasaran ini memiliki anggaran sebesar 3.213.021.572 dengan realisasi sebesar 3.176.182.603.

Sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak memiliki capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja 100% dari target 100%. Sasaran ini memiliki dua Indikator yang pertam Indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO dengan program program perlindungan Perempuan dengan anggaran sebesar 320.557.541 dengan realisasi 304..322.755 dengan capaian 94,94% kemudian indicator kedua dan Program Perlindungan Khusus Anak dengan Anggaran sebesar 377.918.717 dengan realisasi anggaran sebesar 367.818.284.

Sasaran tercapainya standar Anugerah Parahita Ekapraya (APE) memiliki capaian kinerja 94%. Dengan capaian kinerja 118 % dari target 80% Sasaran ini memiliki anggaran sebesar 705.280.747 dengan realisasi 635.040.576 dengan capaian 90.04%.

Sasaran tercapainya Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak memiliki capaian kinerja sebesar 93% dengan realisasi kinerja 117,34% dari target sebesar 80%. Sasaran ini memiliki anggaran sebesar 244.300.743 dengan realisasi anggaran sebesar 243.232.950 sengan persentase 97.33%

Sasaran Meningkatnya Kualitas Data Gender dan Anak memiliki capaian kinerja 46 Jenis data Gender dan Anak dengan target 46 Jenis Data Gender dan Anak. Capaian kinerja 100%. Sasaran ini memiliki anggaran sebesar 181.552.375 dengan realisasi 172.944.586 dengan capaian 95,26%.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 ini, merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 90,3%
- Sasaran 2 terdiri dari - 2 indikator dengan nilai : 234 dan 100%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 94%
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 93%
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.12.089.734.000- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.11.598.801.251- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 490.932.743.- Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi 2024 - 2026 menetapkan sebanyak 5 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari tiga tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2024, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%

- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 234 dan 100%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 94%
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 93%
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 12.089.734.000 telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah 95,94 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.

4.2 Rencana Tindaklanjut

Adanya rekomendasi dari DPRD untuk Honorarium Leembaga Adat Melayu (LAM) Jambi agar sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi tekah selesai membuat peraturan Walikota (PERWAL) terkait Honorarium Lembaga Adat Melayu Jambi dengan Nomor 22 Tahun 2024 tentang tata cara pembiayaandana kegiatan Lembaga Adat Melayu Tanah Pusako Batuah Kota Jambi.

Kota Jambi, Januari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi,

Dra. Hj. NOVERINTIWI DEWANTI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19711125 199201 2 001

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	90
2.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	0,011
		Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	100%
3.	Tercapainya Standar APE	Predikat APE	Nindya
4.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kota Layak Anak	Nindya
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	Jumlah Jenis Data Gender dan Anak	46

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	6.884.224.023	APBD
2	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	644.520.241	APBD
3	Pogram Perlindungan Perempuan	257.679.541	APBD dan DAK
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	211.445.366	APBD
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	252.157.375	APBD
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	295.626.103	APBD
7	Perlindungan Khusus Anak	504.946.717	APBD dan DAK
8.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.485.620.634	APBD
	TOTAL	12.536,220,000	

Jambi, Januari 2024

Pj. Wali Kota Jambi

SRI PURWANINGSIH,SH.,M.A.P

Kepala DPMPPA Kota Jambi

Dra. Hj. NOVERINTIWI EWANTI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19711125199201 2 001

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
PERENCANA AHLI MUDA	KABID. PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
TGL.	TGL.
DODDY MARYANTO, SH	EDI KARSONI, SE, MM
NIP.19840115 200903 1 012	NIP.19850222 201001 1 014